



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HJ. SYAMSIDAR
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 453915

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 4.160.000.000**

1. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 275 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/200 m2 di KAB / KOTA BONE, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 600.000.000
6. Tanah Seluas 53 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 262.800.000**

1. MOBIL, HONDA MB PENUMPANG / MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA V / MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT / JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOTOR, PIAGGIO VESPA SPRIT / SEPEDAH MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000



5. MOTOR, HONDA NF 125 TRF / SPD MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	81.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	456.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.961.100.000
III. HUTANG	Rp.	1.100.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.861.100.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.